



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT " DAMPIT "

Jl. Sumber Kembar 8 - B Telp. (0341) 896256 - 896458

DAMPIT 65181 - MALANG

email : ptbprdampit01@gmail.com Website www.bprdampit.co.id

Dampit, 30 April 2025

No. : 014/BD/Perbarindo/IV/2025

Lamp : -

Hal : **Pelaporan Transparansi Tata Kelola PT.BPR DAMPIT Tahun 2024**

Kepada Yth,

**Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbarindo dan Media BPR**

KOMP. PATRA II NO. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass

RT.15/RW.3, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih

DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan **Laporan Transparansi Tata Kelola tahun 2024.**

Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya.

Hormat kami



**FX. SUWOKO.S.ab**

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAMPIT

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933564-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600898-30042025110906

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

ptbpr\_dampit@ymail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

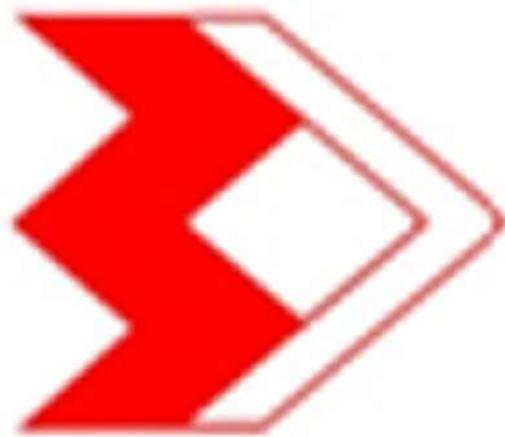
Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-30 11:09:06



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR DAMPIT  
TAHUN 2024**



**Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit  
TELEPON: (0341) 896256, 896458**



## **PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Akte Pendirian No: 192 tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat dihadapan notaris Abdurachim,Sarjana Hukum,Notaris di Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2.4481.HT.01.01 tanggal 17 Mei 1989 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan,terakhir No. 032 tanggal 15 Juli 2024 tentang Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat Dampit menjadi Bank Perekonomian Rakyat Dampit yang dibuat dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja,Sarjana Hukum, di Surabaya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-044686 AH.01.02-2024 tanggal 23 Juli 2024. Kegiatan usaha PT BR DAMPIT dari dulu hingga sekarang masih tetap berada di JL Sumber Kembar No.8b Dampit- Malang.Izin usaha diberikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: KEP.142/KM.13/1989.tanggal 18 September 1989. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Dampit pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 BPR Dampit memiliki komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh OJK sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Malang Raya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Dampit didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Ditahun 2024 dan untuk tahun mendatang, BPR Dampit terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama BPR                | PT BPR DAMPIT   |
| Alamat                  | Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit   |
| Nomor Telepon           | (0341) 896256, 896458   |
| Posisi Laporan          | 31 Desember 2024  |
| Peringkat Komposit      | 2   |
| Predikat Komposit       | Baik  |
| Kesimpulan / Penjelasan | Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. |

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi   |   |  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Nama   | : | Endang Poncowati, SE                       |
|     | Jabatan  | : | Direktur Utama                             |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :   |   |  |
|     | 1. Memimpin dan Mengurus perusahaan; mengelola jalannya usaha sesuai dengan tujuan perusahaan, mengelola aset "PT BPR Dampit" untuk maksud tujuan dan kepentingan "PT BPR Dampit", sesuai tata kelola usaha yang baik agar dipercaya stakeholder, sehingga bisa menunjukkan performa yang bagus dan terus berkembang.<br>2. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<br>3. Manajemen risiko. Sesuai asas independensi dalam penerapan GCG, maka fungsi manajemen risiko harus dipastikan telah beroperasi secara independen tanpa intervensi.<br>4. Melakukan monitoring dan meningkatkan kinerja kantor secara keseluruhan baik dari segi penyaluran kredit, tabungan maupun deposito<br>5. Mengatur dan memutuskan segala tindakan untuk menjaga seluruh aset perusahaan<br>6. Memperhatikan, menilai dan disiplin, motivasi kerja dan loyalitas para karyawan<br>7. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada seluruh karyawan baik dari segi sikap maupun bahasa, dll |   |  |
| 2.  | Nama   | : | Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab           |
|     | Jabatan  | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :   |   |  |
|     | 1. Mengawasi dan mengkoordinasi kepada seluruh karyawan/i<br>2. Manajemen risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas<br>3. Menerapkan dan menyiapkan pedoman program anti pencucian uang dan pendanaan   |   |  |



|  |
|--|
| terorisme<br>4. Mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan secara keseluruhan<br>5. Mengevaluasi dan menyusun rencana bisnis bank<br>6. Menyempurnakan sistem dan prosedur ,pengaturan ,pembukuan ,tugas- tugas dan tanggungjawab masing-masing karyawan<br>7. Memastikan fungsi kepatuhan berjalan dengan lancar<br>8. Memeriksa dan melaporkan laporan tata kelola dan hasil penilaian sendiri (self assesment)<br>9. Melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi penyimpangan intern |
| <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b>   |
| a. Direksi telah menjaga dan memonitoring Tingkat Kesehatan Bank dalam posisi sehat.<br>b. Direksi telah memberikan tindakan tegas kepada karyawan yang melanggar peraturan .<br>c. Untuk pertumbuhan kredit akan lebih ditingkatkan lagi meskipun belum maksimal.<br>d. Meningkatkan penagihan kredit bermasalah telah dilakukan untuk menyehatkan kualitas kredit.   |
| <b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>   |
| -  |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No.  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |   |                          |
|--|--|---|--------------------------|
| 1.   | Nama   | : | Erlyani,SE               |
|  | Jabatan  | : | Komisaris Utama          |
|  | Tugas dan Tanggung Jawab :                                   |   |                          |
| 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di BPR<br>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di BPR<br>3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR<br>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.<br>5. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. |  |   |                          |
| 2.   | Nama   | : | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro |
|  | Jabatan  | : | Komisaris                |
|  | Tugas dan Tanggung Jawab :                                   |   |                          |
| 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di BPR<br>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di BPR<br>3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR<br>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.<br>5. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. |  |   |                          |
| <b>Rekomendasi Kepada Direksi :</b>  |  |   |                          |



- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi Sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku
- d. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan temuan pemeriksaan OJK juga mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

-

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No.   | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|---|---------------------------------|
| 1.  | Komite Audit                    |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| 2.  | Komite Pemantau Risiko          |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| 3.  | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite   |                                 |
| Tidak memiliki Komite Audit ,Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi namun di BPR Dampit memiliki PE Audit Intern dan PE Manajemen Risiko, PE Kepatuhan (dirangkap dengan jabatan Bagian Accounting) |                                 |

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No.  | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--|------|----------|-------------------|------------------|
| 1.   |      |          |                   |                  |
| 2.   |      |          |                   |                  |
| 3.   |      |          |                   |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |      | :        | NIHIL             |                  |



### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No.                     | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| 1.                      | Komite Audit                                     |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 2.                      | Komite Pemantau Risiko                           |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 3.                      | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut |  |   |   |
| NIHIL                   |  |   |   |

## C. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No.   | Nama Direksi                     | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | Endang Poncowati, SE             | Rp0          | 0%                         |
| 2.  | Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                               |                                  |              |                            |
| Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi di BPR |                                  |              |                            |



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.   | Nama Direksi                     | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Endang Poncowati, SE             | -               | -                    | 0%                         |
| 2.  | Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut:  |                                  |                 |                      |                            |
| Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain |                                  |                 |                      |                            |

## D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No.   | Nama Direksi                     | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                                  | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | Endang Poncowati, SE             | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.  | Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                 |                                  |                      |                         |                |
| Tidak terdapat Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR |                                  |                      |                         |                |

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No.   | Nama Direksi                     | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                                  | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | Endang Poncowati, SE             | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.  | Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                 |                                  |                      |                         |                |
| Tidak terdapat Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR |                                  |                      |                         |                |



## E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.   | Nama Dewan Komisaris     | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | Erlyani,SE               | Rp0          | 0%                         |
| 2.  | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                          |              |                            |
| Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR |                          |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.   | Nama Dewan Komisaris     | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Erlyani,SE               | -               | -                    | 0%                         |
| 2.  | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                          |                 |                      |                            |
| Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain |                          |                 |                      |                            |

## F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.   | Nama Dewan Komisaris     | Hubungan Keuangan |                              |                |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|   |                          | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.  | Erlyani,SE               | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.  | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                          |                   |                              |                |
| Tidak terdapat Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR |                          |                   |                              |                |



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.   | Nama Dewan Komisaris     | Hubungan Keluarga |                              |                              |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                          | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham               |
| 1.  | Erlyani,SE               | Tidak ada         | Tidak ada                    | Kentjana Widjaja - Keponakan |
| 2.  | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada                    |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                          |                   |                              |                              |
| Terdapat Hubungan Keluarga antara Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR |                          |                   |                              |                              |

## G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.   | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|   |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.  | Gaji                             | 2            | Rp204.732.000           | 2               | Rp124.200.000           |
| 2.  | Tunjangan                        | 2            | Rp18.000.000            | 0               | Rp0                     |
| 3.  | Tantiem                          | 1            | Rp3.500.000             | 2               | Rp2.700.000             |
| 4.  | Kompensasi Berbasis Saham        | 0            | Rp0                     | 0               | Rp0                     |
| 5.  | Remunerasi Lainnya               | 2            | Rp15.939.000            | 2               | Rp10.350.000            |
| Total   |                                  |              | Rp242.171.000           |                 | Rp137.250.000           |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                                  |              |                         |                 |                         |
| Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai RUPS |                                  |              |                         |                 |                         |



## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.  | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|
|  |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1.   | Perumahan                            | Tidak ada  | Tidak ada       |
| 2.   | Transportasi                         | Kendaraan (1)  | Tidak ada       |
| 3.   | Asuransi Kesehatan                   | BPJS Kesehatan (2), BPJS Ketenagakerjaan (2)             | Tidak ada       |
| 4.   | Fasilitas Lainnya                    | Tidak ada  | Tidak ada       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                                      |  |                 |
| Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS |                                      |  |                 |

## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan   | Perbandingan |
|--|--------------|
|  | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 2 : 1        |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 3 : 1        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |              |
| NIHIL  |              |

## I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat   | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|-----|-----------------|----------------|---|
| 1.  | 16 Januari 2024 | 2              | 1. Posisi pinjaman selama Triwulan IV tahun 2023 tidak mencapai target ,karena kinerja marketing belum maksimal<br>2. Prosentase NPL posisi triwulan IV tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, volume kredit juga |



## PT BPR DAMPIT

Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit

Telepon: (0341) 896256, 896458

Website: www.bprdampit.co.id, Email: ptbprdampit01@gmail.com

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
|   |                  |   | mengalami penurunan.<br>3. Setiap ada peraturan baru dari OJK agar segera di update dan disosialisasikan kepada pegawai BPR.<br>4. Penagihan kredit hapus buku agar lebih ditingkatkan.   |
| 2.  | 06 Mei 2024      | 2 | 1. BPR belum bisa memaksimalkan dana tambahan modal, sehingga ditempatkan pada bank lain cukup besar<br>2. Marketing belum mampu meningkatkan realisasi kredit shg agar meningkatkan kinerjanya supaya pada semester I th 2024 target bisa tercapat.<br>3. Pembuatan proposal harus menggunakan data data lengkap dan akurat, sehingga menghasilkan analisa yang komprehensif.<br>4. Penanganan NPL sudah baik dan penagihan kredit hapus buku agar ditingkatkan karena bisa menambah laba.   |
| 3.  | 10 Juli 2024     | 2 | 1. Direksi harus mendorong marketing lebih meningkatkan kinerjanya karena dalam semester II tahun 2024 realisasi kredit belum mencapai target.<br>2. Penanganan NPL masih kurang terkoordinasi, posisi NPL masih tinggi , untuk kedepannya Direksi dan team marketing agar berupaya meningkatkan penagihan dengan surat teguran supaya jera.<br>3. Penggalangan dana pihak III sudah sesuai dengan target namun belum bisa memaksimalkan pelembaran dana sehingga perolehan laba tidak mencapai target.<br>4. Direksi dan jajarannya harus bekerja lebih keras mengambil langkah2 yang diperlukan untuk meningkatkan pelembaran kredit.                         |
| 4.  | 16 November 2024 | 2 | 1. Manajemen agar segera mengambil langkah2 cepat meningkatkan pelembaran kredit agar target Desember 2024 bisa tercapai.<br>2. Mempertimbangkan kembali penggalangan dana pihak III mengingat pertumbuhan kredit lambat sehingga meningkatkan iddle fund<br>3. Kinerja marketing harus ditingkatkan karena target pelembaran kredit belum terpenuhi.<br>4. Peran bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan belum maksimal sehingga Direksi harus lebih intensif melakukan pembinaan.<br>5. Dalam menyusun RBB agar memperhatikan kondisi perekonomian, inflasi, pertumbuhan kredit, perolehan laba, penurunan NPL dan mempersiapkan pemberlakuan perhitungan CKPN. |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :   |                  |   |   |
| Pelaksanaan Rapat telah dihadiri oleh 2 anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan 4 (empat) kali dalam 1 tahun |                  |   |   |



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No.  | Nama Dewan Komisaris     | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|  |                          | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.   | Erlyani,SE               | 4                   | 0              | 100%                        |
| 2.   | Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro | 4                   | 0              | 100%                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                          |                     |                |                             |
| Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat dalam 1 tahun dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |                          |                     |                |                             |

## J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)   | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya   | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |   |               |                         |               |                  |               |                     |               |
| Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, dan seluruh karyawan PT. BPR Dampit. |   |               |                         |               |                  |               |                     |               |



### K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum  | Jumlah (Satuan) |        |
|---|-----------------|--------|
|   | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai   | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian   | 0               | 0      |
| Total   | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut   |                 |        |
| Selama tahun 2024 Tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi |                 |        |

### L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No.  | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|--|--|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|  | Nama                                     | Jabatan | Nama                | Jabatan |                 |                                 |            |
| 1.   |  |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 2.   |  |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 3.   |  |         |                     |         |                 |                                 |            |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |  |         |                     |         |                 |                                 |            |
| Ditahun 2024 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan |  |         |                     |         |                 |                                 |            |

### M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No.  | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1.   |                     |                                  |                     |               |             |
| 2.   |                     |                                  |                     |               |             |
| 3.   |                     |                                  |                     |               |             |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik          |                     |                                  |                     |               |             |
| Selama tahun 2024 Tidak terdapat Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik |                     |                                  |                     |               |             |



**PT BPR DAMPIT**  
Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit  
Telepon: (0341) 896256, 896458  
Website: [www.bprdampit.co.id](http://www.bprdampit.co.id), Email: [ptbprdampit01@gmail.com](mailto:ptbprdampit01@gmail.com)

---

Malang, 25 April 2025

**PT BPR DAMPIT**

Mengetahui  
  
**Endang Poncowati, SE**  
Direktur Utama

Menyetujui  
  
**Eriyani, SE**  
Komisaris Utama